

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

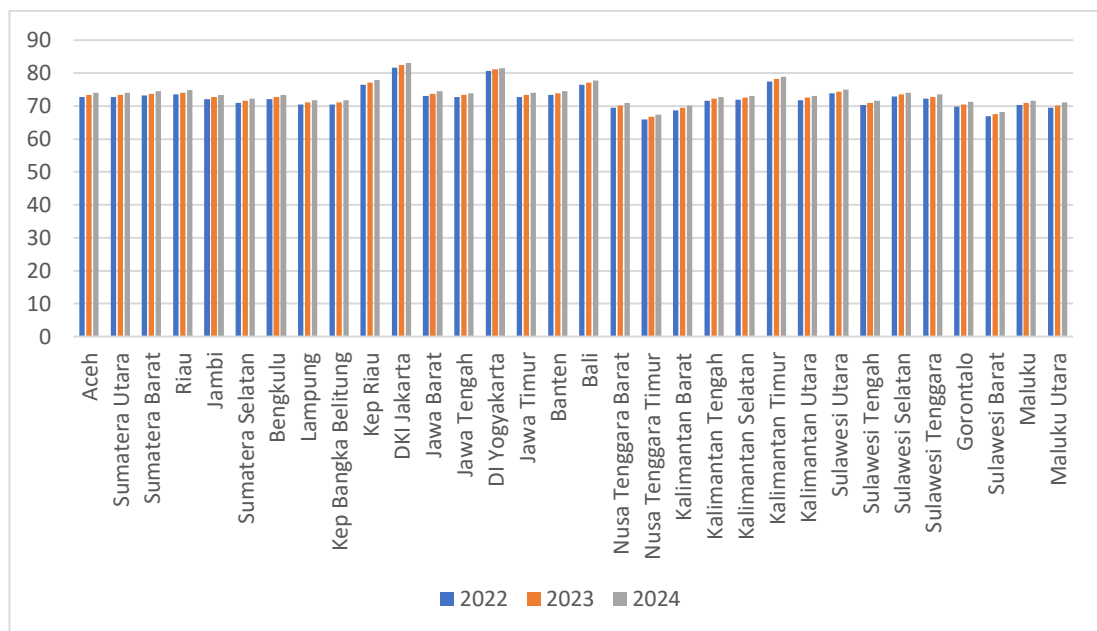
Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kemajuan suatu negara. Kemajuan suatu negara tidak semata-mata diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga mencakup dimensi harapan hidup, kesehatan, serta kualitas pendidikan masyarakat. Secara konseptual, pembangunan manusia mencerminkan proses perluasan kesempatan bagi individu untuk mencapai kehidupan yang layak, yang umumnya dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas dasar dan kemampuan daya beli. Ketika masyarakat telah memiliki keterampilan yang memadai, maka produktivitas mereka pun akan meningkat, sehingga berkontribusi secara signifikan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi (Laisina et al., 2015).

Sebagai respons terhadap pentingnya orientasi pembangunan yang berpusat pada manusia, *United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan suatu indikator yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu angka harapan hidup saat lahir, tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta kemampuan daya beli masyarakat, sebagai representasi kesejahteraan ekonomi individu (Jasasila, 2020).

Pembangunan manusia di Indonesia merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda strategis nasional, sebagaimana tercermin dalam berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah menempatkan peningkatan kualitas pendidikan,

layanan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan sebagai fokus utama dalam mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM sendiri menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas hidup masyarakat secara umum, karena mencakup tiga dimensi pokok: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

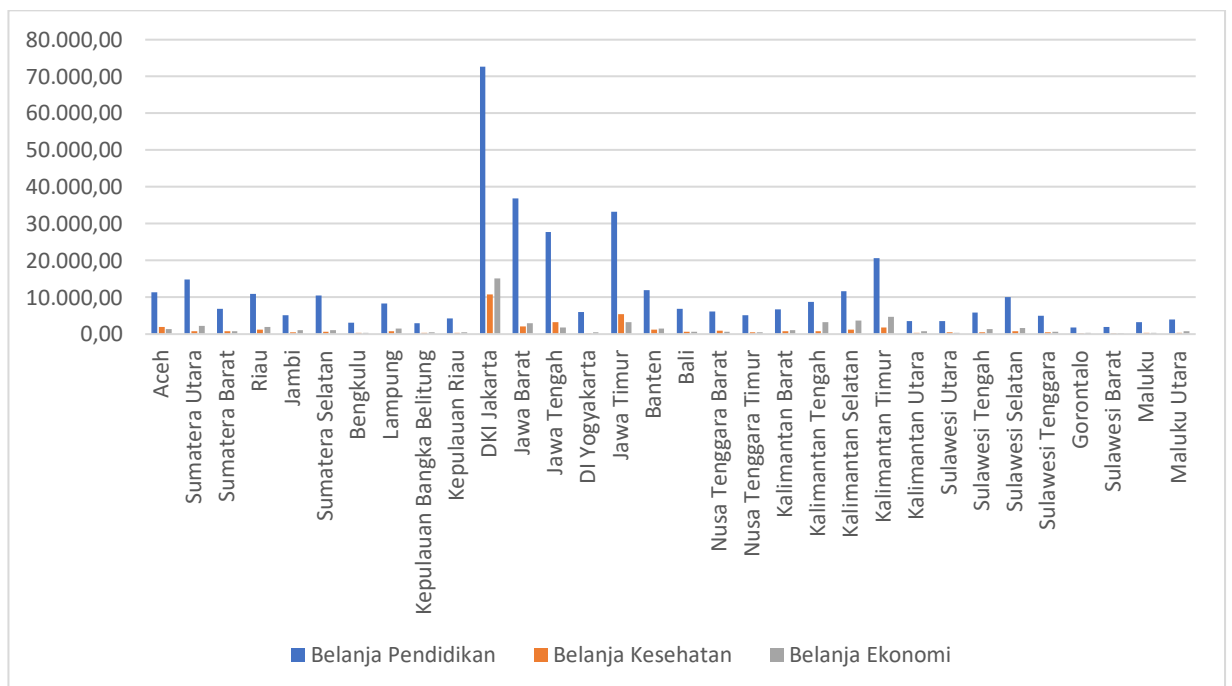
Namun demikian, visi besar pembangunan manusia tersebut sangat bergantung pada efektivitas kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal, dalam bentuk pengeluaran negara memiliki peran penting dalam menyediakan layanan dasar publik, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Dalam konteks pembangunan SDM, alokasi belanja negara di sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang tidak hanya berdampak pada generasi saat ini, tetapi juga generasi mendatang.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2022-2024

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat adanya disparitas yang cukup lebar antara provinsi di Pulau Jawa dan wilayah Indonesia bagian timur. Meskipun secara nasional IPM mengalami kenaikan, namun *gap* yang signifikan ini mengindikasikan bahwa distribusi pembangunan kualitas hidup belum merata. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan fiskal yang selama ini dijalankan, sejauh mana instrumen belanja negara dan transfer ke daerah mampu mengintervensi ketimpangan kualitas sumber daya manusia tersebut.



Sumber: Kemendikbud dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 1. 2 Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Dan Belanja Ekonomi Setiap Provinsi Di Indonesia Tahun 2024 (Miliar Rupiah)

Gambar 1.2 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam alokasi belanja pemerintah daerah di berbagai provinsi di Indonesia, khususnya pada belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi. Secara umum, belanja pendidikan merupakan komponen dengan nilai terbesar di sebagian besar provinsi, terutama pada provinsi dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi

seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sementara itu, belanja kesehatan relatif lebih kecil dibandingkan belanja pendidikan, meskipun tetap menjadi salah satu sektor penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, belanja ekonomi juga menunjukkan variasi antarprovinsi, dengan beberapa wilayah memperlihatkan alokasi yang cukup besar sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur dan sektor produktif.

Perbedaan alokasi anggaran tersebut mencerminkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan di berbagai daerah masih menunjukkan ketimpangan dalam prioritas pembangunan. Beberapa provinsi mampu mengalokasikan anggaran yang relatif besar pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia, sementara provinsi lainnya masih memiliki keterbatasan fiskal sehingga alokasi belanjanya relatif lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia belum sepenuhnya merata antarwilayah, yang dapat dipengaruhi oleh variasi kemampuan fiskal dan kebijakan pengeluaran pemerintah daerah.

Dengan demikian, grafik tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal melalui belanja pendidikan, kesehatan, dan ekonomi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan manusia. Namun, perbedaan alokasi belanja antarprovinsi menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan fiskal tersebut mampu memengaruhi kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara empiris pengaruh kebijakan fiskal, khususnya belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi, terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
2. Apakah pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
3. Apakah pengeluaran pemerintah pada belanja ekonomi berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada belanja pendidikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada belanja kesehatan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada belanja ekonomi terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi institusi pendidikan, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dalam aspek yang sama maupun dari pengembangan penelitian ini.
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna untuk mendorong perhatian yang lebih besar terhadap belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi. Serta hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
3. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan mendapat gambaran tentang pengaruh pengeluaran pemerintah pada belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Modal Manusia

Teori yang menyatakan bahwa manusia bukan hanya faktor produksi, tetapi juga bentuk modal yang dapat meningkatkan produktivitasnya melalui investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Teori ini dipelopori oleh Theodore W. Schultz dan Gary S. Becker.

Modal manusia atau *human capital* merujuk pada potensi yang dimiliki individu, baik yang tampak secara nyata maupun yang belum tergalinya sepenuhnya. Potensi yang tampak dapat diidentifikasi melalui pelaksanaan tugas sehari-hari, yang mencerminkan sejauh mana seseorang mampu menyelesaikan pekerjaan berdasarkan standar penilaian saat ini. Dengan kata lain, modal manusia mencerminkan kapasitas individu untuk menjalankan berbagai fungsi atau tanggung jawab dalam suatu organisasi (Amirul, 2017).

Menurut Romer (1996), mutu modal manusia mencerminkan kapasitas individu dalam bentuk kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan, yang menjadikan manusia sebagai sumber daya produktif yang bernilai. Sementara itu, Hildebrand (1995) menyatakan bahwa mutu modal manusia meliputi aspek gizi, harapan hidup, keterampilan, pengetahuan, kemampuan, serta sikap. Kedua pandangan ini menegaskan bahwa manusia harus dipandang sebagai bentuk modal tersendiri yang setara pentingnya dengan modal fisik

dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Todaro (2000), modal manusia dapat diidentifikasi melalui dua aspek utama, yaitu pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan pelatihan memberikan nilai tambah bagi individu karena semakin tinggi tingkat pendidikan atau semakin sering seseorang mengikuti pelatihan, maka semakin meningkat pula kemampuan serta keterampilannya. Di sisi lain, kesehatan dan pendidikan saling berhubungan erat. Individu yang sehat lebih mampu memanfaatkan pendidikan secara optimal, sementara tingkat pendidikan yang lebih tinggi turut meningkatkan kesadaran individu terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Oleh karena itu, produktivitas seseorang akan lebih maksimal jika ditopang oleh kombinasi keduanya. Keterkaitan erat antara aspek kesehatan dan pendidikan tersebut pada akhirnya menjadi fondasi dasar dalam menilai kualitas sumber daya manusia di tingkat nasional.

2.1.2 Pembangunan Manusia

Menurut Todaro dan Smith (2011) pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional yang disertai dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Dalam perspektif ini, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Menurut Amartya Sen (1999) yang mengemukakan konsep

pembangunan sebagai perluasan kebebasan (*development as freedom*). Menurutnya, pembangunan harus dilihat sebagai proses memperluas kemampuan (*capabilities*) individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap berbagai layanan publik menjadi bagian penting dalam proses pembangunan manusia. Sejalan dengan pandangan tersebut, *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan konsep pembangunan manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebagai alat ukur komposit, IPM mengintegrasikan tiga dimensi utama, yakni umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Pembangunan manusia pada hakikatnya menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang paling utama sekaligus menjadi tujuan akhir dari seluruh proses pembangunan, bukan sekadar alat untuk mencapai pertumbuhan semata. Merujuk pada konsep yang diusung oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), fokus utama dari upaya ini adalah menciptakan lingkungan kondusif yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan dengan umur panjang, kondisi kesehatan yang baik, serta kemampuan untuk beraktivitas secara produktif. Melalui kerangka ini, pembangunan manusia didefinisikan secara substantif sebagai sebuah proses perluasan pilihan bagi penduduk guna meningkatkan kualitas dan martabat hidup secara berkelanjutan (BPS, 2014).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memegang peran sebagai indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Selain berfungsi sebagai instrumen untuk menetapkan peringkat serta level pembangunan antarwilayah maupun antarnegara, IPM juga merupakan data strategis bagi pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan karena IPM tidak hanya digunakan sebagai tolok ukur efektivitas kinerja pemerintah, tetapi juga menjadi variabel penentu dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga mencerminkan pentingnya keterkaitan antara capaian kualitas sumber daya manusia dengan distribusi sumber daya fiskal di daerah.

Sejak tahun 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi metodologi baru dalam penghitungan IPM untuk menyelaraskan dengan perubahan yang dilakukan oleh UNDP. Penyempurnaan metode IPM dilakukan dengan mengadopsi indikator yang lebih diskriminatif dan tepat sasaran, di mana dimensi pendidikan kini diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk memberikan gambaran yang lebih relevan, serta penggantian Produk Domestik Bruto (PDB) dengan Produk Nasional Bruto (PNB) agar lebih akurat dalam merepresentasikan pendapatan masyarakat. Secara teknis, setiap komponen dimensi kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran terlebih dahulu distandardisasi menggunakan batas nilai minimum dan maksimum, kemudian dihitung menjadi indeks gabungan menggunakan metode rata-rata geometrik. Penggunaan rata-rata geometrik menegaskan bahwa ketiga dimensi

tersebut memiliki bobot kepentingan yang setara dan memerlukan perhatian yang seimbang dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas.

Ada beberapa variabel dalam Indeks Pembangunan Manusia yaitu:

a) Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidupnya sejak dilahirkan.

b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah ditempuh oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

c) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai perkiraan durasi sekolah dalam satuan tahun yang akan ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu di masa mendatang.

d) Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan berdasarkan nilai pengeluaran per kapita riil yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*).

2.1.3 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kebijakan ini dilakukan untuk memperbaiki keadaan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal juga dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian negara menjadi lebih baik dengan cara mengubah sisi penerimaan ataupun sisi pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Rahayu, 2014).

Peranan kebijakan fiskal adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan mengalokasikan sumber daya manusia khususnya untuk fungsi stabilitas dan pemerataan akan lebih efektif apabila dilakukan oleh pemerintah pusat. Fungsi alokasi akan lebih efektif jika dilakukan oleh pemerintah daerah (Kuncoro, 1995).

Pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian dikemukakan oleh Keynes. Sebelum Keynes, operasi keuangan pemerintah dipandang tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja dan permintaan agregat. Peran pemerintah pada saat itu hanya sebatas merelokasi sumber daya finansial dari sektor swasta ke pemerintah. Setiap tambahan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan penurunan pengeluaran swasta (*crowding out*) dalam jumlah yang sama dan pengeluaran tersebut tidak akan mengubah pendapatan agregat. Kemudian pandangan tersebut diubah oleh Keynes dan sejak saat itu ekonom

mulai menekankan dampak makro atas pengeluaran dan pajak pemerintah. Keynes menekankan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah tidak hanya memindahkan sumber daya dari sektor swasta ke pemerintah (Surjaningsih *et al.*, 2012).

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah (Sukirno, 2000).

Teori belanja pemerintah berakar pada pandangan ekonomi publik yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar. Menurut Musgrave (1959) dan Stiglitz (2015), fungsi utama pemerintah dalam perekonomian terdiri atas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang publik, termasuk pendidikan dan kesehatan yang menghasilkan eksternalitas positif bagi masyarakat.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Belanja Pendidikan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia

Belanja pendidikan merujuk pada alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah atau individu untuk mendukung sektor pendidikan. Melalui belanja pendidikan, suatu masyarakat dapat meningkatkan tingkat literasi, pengetahuan, dan keterampilan, yang

pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan manusia. Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, suatu negara dapat meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan. Dalam hal ini, tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan relatif mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui keterampilan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kreativitas masyarakat. (Harsono *et al.*, 2024).

Menurut Lanjouw dan rekan-rekan, pendidikan dapat membuka peluang yang lebih besar bagi individu untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Kondisi pendidikan masyarakat sangat memengaruhi kemampuan dalam mengakses, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya, termasuk dalam hal penguasaan teknologi dan pengembangan kelembagaan. Pendidikan yang berkualitas memungkinkan terjadinya adopsi dan inovasi teknologi yang dibutuhkan dalam mendorong pembangunan manusia (Laisina *et al.*, 2015).

2.2.2 Hubungan Belanja Kesehatan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kesehatan merupakan salah satu prasyarat utama dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, di mana belanja kesehatan dipandang sebagai pembentukan modal manusia (*human capital investment*) yang bersifat dasar, ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk layanan medis, gizi, dan sanitasi, maka angka kesakitan serta kematian akan menurun. Hal ini secara langsung

meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), yang merupakan salah satu indikator utama dalam IPM. Kesehatan merupakan fondasi bagi perkembangan kapasitas kognitif yang optimal untuk menyerap ilmu pengetahuan, sekaligus memperkuat daya tahan fisik dalam bekerja. Dengan demikian, tingkat kesehatan masyarakat menjadi pemicu utama yang menggerakkan kualitas pembangunan manusia secara menyeluruh.

Menurut Schultz, kondisi kesehatan yang buruk dapat berdampak negatif terhadap total faktor produktivitas, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat output nasional. Ketika individu tidak memiliki kondisi kesehatan yang memadai untuk bekerja, mereka akan keluar dari angkatan kerja aktif, yang pada akhirnya menurunkan tingkat partisipasi tenaga kerja. Oleh karena itu, kesehatan dapat dipandang sebagai indikator fundamental yang memengaruhi produktivitas suatu negara (Ercelik, 2018).

2.2.3 Hubungan Belanja Ekonomi dengan Kualitas Sumber Daya Manusia

Belanja ekonomi merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor industri, perdagangan, transportasi, serta berbagai program yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui pengeluaran tersebut, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi peningkatan produktivitas masyarakat dan perluasan kesempatan kerja.

Menurut Todaro dan Smith (2011), investasi pemerintah dalam sektor ekonomi dan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, kemampuan individu untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan, serta standar hidup yang layak juga akan meningkat.

Menurut Rostow (1960) dalam teori tahapan pembangunan ekonomi, investasi pemerintah pada sektor infrastruktur dan kegiatan ekonomi merupakan salah satu prasyarat penting untuk mendorong proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi, membuka peluang usaha baru, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Oleh karena itu, belanja ekonomi tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi penting terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesempatan kerja, akses terhadap layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Studi Empiris

Naknok (2021) menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap akumulasi modal manusia di Thailand. Variabel independen yang digunakan meliputi efektivitas tenaga kerja, inovasi, utang publik, dan pendapatan pribadi, sedangkan variabel dependen meliputi modal manusia yang

diprosikan dengan rasio Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap jumlah tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, efektivitas tenaga kerja, inovasi, dan pendapatan pribadi berpengaruh positif terhadap modal manusia, sementara utang publik berpengaruh negatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan inovasi dapat mendorong pengembangan sumber daya manusia, sedangkan peningkatan utang publik yang tidak dikelola secara optimal berpotensi menghambat akumulasi modal manusia di Thailand.

Anyanwu dan Erhijakpor (2007) menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan terhadap capaian kesehatan masyarakat di negara-negara Afrika. Variabel dependen yang digunakan adalah angka kematian bayi dan angka kematian balita, sedangkan variabel independen utama meliputi pengeluaran kesehatan per kapita, pengeluaran pendidikan, dan pendapatan per kapita, serta beberapa variabel kontrol sosial ekonomi seperti tingkat literasi perempuan, urbanisasi, dan jumlah tenaga medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran kesehatan dan pendidikan menurunkan angka kematian bayi dan balita di Afrika. Selain itu, tingkat literasi perempuan dan ketersediaan tenaga kesehatan juga berperan penting dalam memperbaiki hasil kesehatan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah yang efektif di sektor pendidikan dan kesehatan merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara Afrika.

Tjodi *et al.* (2018) melakukan penelitian yang menganalisis keterkaitan antara alokasi pengeluaran pemerintah di berbagai sektor terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran sektor pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, variabel pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada struktur analisis berikutnya, ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan fiskal yang direpresentasikan melalui pengeluaran sektor pendidikan memiliki dampak positif terhadap pembangunan manusia secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran sektor kesehatan belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia dalam jangka pendek.

Septiani (2019) dalam penelitiannya yang berfokus menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, belanja sektor pendidikan dan sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu. Sebaliknya, belanja sektor infrastruktur memiliki pengaruh positif. Secara simultan, ketiga sektor pengeluaran tersebut berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga menyajikan analisis dalam perspektif ekonomi Islam, yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan spiritual maupun material. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa pengeluaran sektor infrastruktur memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan membutuhkan perhatian lebih lanjut dalam konteks efektivitas dan pemerataan manfaatnya.

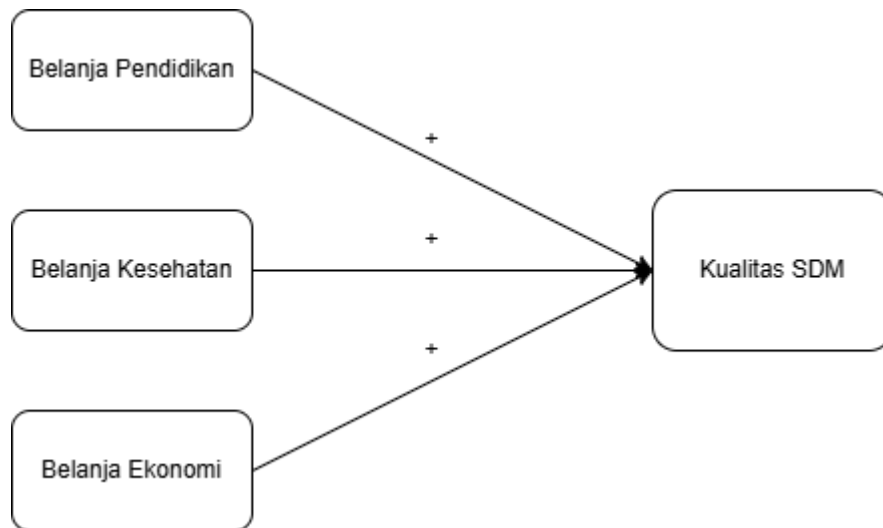
Asnuryati (2024) menganalisis bagaimana pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM, baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel antara. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan justru menunjukkan pengaruh negatif terhadap IPM, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sektor kesehatan memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Maros, sedangkan belanja pendidikan belum optimal dalam mendorong peningkatan IPM dalam jangka pendek, sehingga memerlukan evaluasi dan peningkatan efektivitas kebijakan fiskalnya.

Isyah (2019) dalam penelitiannya yang menganalisis bagaimana kebijakan fiskal daerah melalui pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mempengaruhi tingkat pengangguran, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja pendidikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap tingkat pengangguran melalui IPM, sedangkan belanja kesehatan

menunjukkan pengaruh negatif secara tidak langsung terhadap tingkat pengangguran melalui IPM. Sementara itu, belanja infrastruktur tidak berpengaruh secara langsung terhadap pengangguran, namun berpengaruh negatif secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menjelaskan bahwa peningkatan belanja di sektor publik dapat memberikan efek berantai terhadap kualitas sumber daya manusia dan aktivitas ekonomi secara umum.

Mardianto dan Fazaalloh (2025) menganalisis dampak pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan fokus perbandingan antara wilayah Gerbangkertosusila dan seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah Gerbangkertosusila, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM. Namun, pengeluaran di sektor pendidikan di wilayah tersebut tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, pada lingkup 38 kabupaten/kota di Jawa Timur secara keseluruhan, pengeluaran di ketiga sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belanja sektor kesehatan dan ekonomi memiliki kontribusi yang kuat dalam mendorong kualitas sumber daya manusia di kedua lingkup wilayah, sedangkan efektivitas belanja pendidikan masih menunjukkan variasi hasil yang memerlukan penguatan strategi alokasi anggaran agar dapat memberikan dampak yang lebih merata dalam meningkatkan kesejahteraan publik.

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tinjauan teoritis, dan kerangka pemikiran, maka hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pendidikan diduga berpengaruh positif terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Belanja Kesehatan diduga berpengaruh positif terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Belanja Ekonomi diduga berpengaruh positif terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia.